

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik menjadi tugas terbesar bagi seluruh partai yang mana di zaman ini hak perempuan untuk terlibat dalam politik telah dijamin oleh Undang- Undang sebanyak 30%. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 mengenai partai politik, terdapat ketentuan pasal ayat (2) yang menetapkan bahwa 30 % dari pendirian dan pembentukan partai politik harus melibatkan perempuan. Selanjutnya pada ayat 5 (lima) disebutkan bahwa pengurus partai politik tingkat pusat juga harus memiliki setidaknya 30% perwakilan perempuan. Selain itu, pasal 20 menjelaskan juga bahwa pengurus partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30% sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing- masing partai politik. Hal ini bertujuan agar perempuan aktif dalam ranah publik terutama di dalam arena politik. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat ikut andil dalam pemerintahan untuk memperjuangkan hak dan aspirasi kalangan perempuan. Dengan itu pemerintah mencoba untuk mewadahi perempuan agar mereka dapat berkontribusi dalam ruang publik dengan mengeluarkan UU yang menjamin hak perempuan di ranah publik.

Akan tetapi pada praktinya perempuan masih belum berkontribusi penuh walaupun Undang- undang telah menjamin hak perempuan ikut berpartisipasi, 30% keterwakilan perempuan di dalam politik belum memenuhi kuota itu. Hal ini dapat dilihat dalam posisi perwakilan perempuan di legislatif di Jawa Barat. Menurut data dari Pusakapol UI, dari 120 anggota legislatif terpilih di DPRD Jawa Barat, hanya terdapat 23 orang perempuan. Persentase perempuan ini adalah 19,1% dari total

anggota DPRD, sedangkan 97 orang lainnya adalah laki-laki. Jika melihat dari perspektif partai politik, hanya 21,1% dari kuota 30% tersebut yang terisi oleh perempuan.

Tabel 1.1  
Anggota DPRD Jawa Barat 2019-2024

NO	Anggota Legislatif Terpilih di DPRD Jawa Barat	Partai
1	Hj. Siti Muntamah, S.Ap.	PKS
	Hj. Sari Sundari, S.Sos.	
2	Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn.	PDIP
	Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si.	
	Hj. Asyanti Rozana Thalib, S.E.	
	Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.	
	Hj. Sumiyati, S.Pd.I.	
	Hj. Iis Turniasih	
	Dra. Hj. Ijah Hartini	
3	Hj. Cucu Sugyati, S.E., M.M.	GOLKAR
	Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H.	
	Ade Puspitasari, S.Sos., M.B.A.	
4	Dra. Hj. Tia Fitriani	NASDEM
5	Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, S.T., M.E.Sy.	PAN
	Dessy Susilawati, S.Pd.I.	
6	Hj. Lilis Boy	DEMOKRAT
7	Dra. Lina Ruslinawati	GERINDRA
	Ir. Prasetyawati, M.M	
	Hj. Tina Wiryawati, S.H.	
	Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., M.M.	
8	Erni Sugiyanti, S.Ag.	PKB
	Yuningsih	
9	Hj. Neng Madinah Ruhiat	PPP

(Sumber : DPRD Jabar. <https://dprd.jabarprov.go.id/profil/anggota> tabel diolah oleh peneliti)

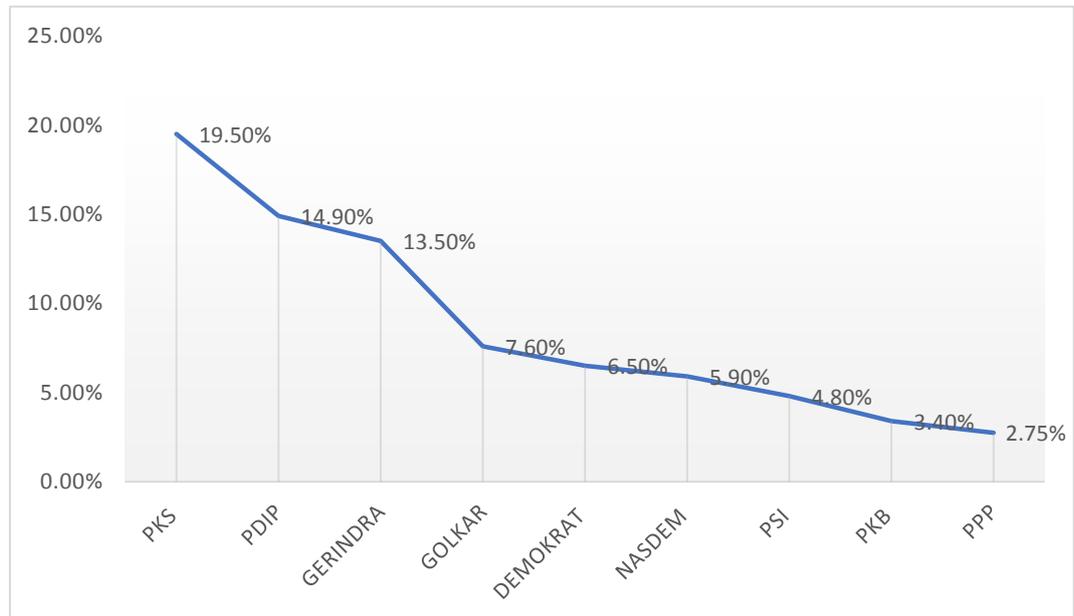
Adapun untuk membantu memenuhi partisipasi 30% tersebut partai politik membantu mewadahi perempuan untuk mewujudkan hal tersebut. Baik itu dengan cara memberikan pendidikan bagi perempuan ataupun mengadakan agenda kegiatan yang menimbulkan kepercayaan diri perempuan untuk dapat menjadi perwakilan kelompoknya khususnya di instansi pemerintahan . Ketidakpercayaan diri pada perempuan itu muncul karena masih adanya stigma negatif di masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu seharusnya tidak berada di dalam ruang publik, melainkan perempuan telah di konstruksi menjadi makhluk domestik yang keberadaannya hanya seputar rumah tangga (dapur, sumur, kasur).

Dalam menumbuhkan kesadaran tersebut perlu adanya dukungan salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar kesadaran pada perempuan tumbuh dan stigma di masyarakat itu dapat di bantah dengan memberikan pembuktian. Kartono mengatakan dalam bukunya bahwa pendidikan politik merupakan usaha yang sengaja dilakukan dan diorganisir secara sistematis untuk mengembangkan individu agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik bersama (Kartono, 1996).

Salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan politik tersebut dapat di peroleh secara formal dari kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh partai politik. Setiap partai politik memiliki berbagai macam bentuk pendidikan politik untuk para kadernya. Salah satu partai politik yang memberikan pendidikan politik bagi perempuan adalah partai PKS. Khususnya di kota Bandung PKS merupakan partai pemenang dalam beberapa kali kontestasi pemilu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

## Rekapitulasi Pemilihan Legislatif 2019 Kota Bandung



(Sumber : Data KPU <https://opendata.kpu.go.id/dataset/eb039deb7-4fb1a4111-5e4337142-f22a2>)

Gambar 1.1 diatas memuat data bahwa pada pemilu 2019 PKS meraih suara lebih banyak dari partai lainnya yaitu sebanyak 19,5% atau sejumlah 295.615 ( Dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima belas suara). Pencapaian ini tentunya berkaitan juga dengan proses pendidikan yang diberikan PKS kepada masyarakat yang membuat masyarakat percaya bahwa PKS mampu mewakili mereka di parlemen baik itu dari laki- laki maupun perwakilan perempuan.

Berdasarkan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai PKS tentunya merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan kader PKS dalam menumbuhkan kepercayaan di masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PKS sehingga dapat membentuk kader yang dapat dipercaya oleh Masyarakat. Partai PKS yang mana dalam proses pendidikan politik yang diberikan PKS membentuk bidang- bidang dalam susunan kepartaiannya yang mewadahi akan kegiatan tersebut. Khususnya bidang perempuan di

selenggarakan oleh bidang yang dinamakan dengan BPKK PKS (Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga). Yang mana bidang ini memiliki visi yaitu "Menjadi Partai Islam Rahmatan *Lil 'Alamin* yang Kokoh dan Terdepan dalam Melayani Rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada aspek penguatan peran perempuan dan ketahanan keluarga. Adapun BPKK PKS dalam melaksanakan tupoksi kerjanya berpijak kepada 4 pilar landasan yaitu ketahanan keluarga, penguatan paradigma ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas dan penokohan anggota perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan. Sehingga dengan 4 (empat) pilar yang menjadi landasan berpijak dan bergerak tersebut BPKK berpendapat bahwa perempuan yang bekerja harus diperkuat dari dua perspektif: peran dasar mereka sebagai istri dan ibu dan peran luas mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan politik perempuan.

Selain mewadahi pendidikan perempuan BPKK PKS juga berfokus kepada forum keluarga untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap berbagai permasalahan keluarga, selain itu BPKK PKS selain memberikan pendidikan politik kepada kader perempuannya dan mempersiapkan untuk ikut kontestasi di instansi pemerintahan, BPKK PKS juga melakukan pemberdayaan melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), organisasi ini mempersiapkan anggotanya untuk menjadi konsultan keluarga. Layanan konsultasi keluarga RKI merupakan bagian dari sejumlah kegiatan RKI seperti Sekolah Pra Nikah, Parenting, Forum Ayah, Sahabat Anak dan Remaja, Sahabat Ibu, Sahabat Lansia, Pos Ekonomi Keluarga dan RKI Peduli (BPKK PKS Jawa Barat Resmikan Beranda Konsultasi Keluarga, 2023).

Dengan itu PKS menyiapkan kadernya untuk mengisi posisi strategis di ranah publik ataupun di pemerintahan (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, 2023).

Tabel 1.2  
Daftar Anggota DPRD Kota Bandung

NO	Anggota DPRD Perempuan di DPRD Kota Bandung	Partai	Jumlah	Peresentase
1.	Nenden Sukaesih	Golkar	1	$1/50 \times 100 = 2\%$
2.	Rieke Suryaningsih, SH	PDIP	1	$1/50 \times 100 = 2\%$
3.	Salmiah Rambe, S. Pd. I	PKS	3	$3/50 \times 100 = 6\%$
	H. Siti Nurjanah, SS			
	drg. Susi Sulastri			
4.	drg. Maya Himawati	Gerindra	3	$3/50 \times 100 = 6\%$
	Nunung Nurasiah, S.Pd			
	N. Wina Sariningsih, SE			
5.	Dr. Rini Ayu Susanti, SE., M.Pd	Demokrat	1	$1/50 \times 100 = 2\%$
	<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>18%</b>

Sumber : DPRD Kota Bandung ( <https://dprd.bandung.go.id/profil/daftar-anggota>)

Dalam Tabel 1.2 berikut memperlihatkan bahwa dari 50 (Lima Puluh) jumlah anggota DPRD Jawa Barat keterwakilan perempuan dalam ranah parlementer yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang perempuan dari total

50 anggota legislatif yang terpilih, 41 (empat puluh satu) diantaranya adalah laki-laki. Perempuan hanya menduduki 18% dari keseluruhan, dengan rata-rata 19,6% per partai dari sembilan partai yang terpilih. Empat partai yaitu PKB, Nasdem, PPP, dan PSI, tidak menempatkan kader perempuannya di DPRD kota Bandung. Sebaliknya, PKS, Demokrat, PDIP, GOLKAR dan Gerindra menunjukkan konsistensi dengan menempatkan kader perempuannya yang memberikan asumsi bahwa kelima partai tersebut memiliki kesadaran massa untuk memilih dan menempatkan kader perempuan terbaiknya di posisi legislatif dan eksekutif tingkat daerah setempat.

Dapat dilihat bahwa PKS khususnya di kota Bandung yang menjadi tempat penelitian penulis mampu mendistribusikan kader perempuannya lebih banyak di parlemen dari partai yang lainnya. Selain itu jika dibandingkan dengan partai GOLKAR yang pengkaderan perempuannya dilakukan oleh sayap GOLKAR yang dinamakan dengan KPGG masih memperoleh suara yang minim dari partai PKS. Hal ini tentunya dapat menjadi perbandingan antara kedua lembaga yang sama-sama pengkaderan perempuan tersebut sehingga PKS mampu mendistribusikan kadernya lebih banyak. Selain itu juga kota Bandung dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki wilayah strategis dan dapat menjadi indikator pergerakan perempuan yang signifikan. Yang penting digaris bawahi bahwa salah satu dari lima partai besar yang berhasil mendistribusikan kekuasaan politik di kota Bandung adalah Partai PKS. Yang mana ada tiga (3) perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan kota Bandung. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan apakah keterwakilan perempuan tersebut memang terpilih atas kesadaran masyarakat bahwa perempuan tidak hanya di wilayah domestik saja ataukah ada pengaruh dari partai PKS nya sendiri. Melihat data yang ada bahwa partai PKS merupakan salah satu partai yang diminati di kota Bandung karena pengkaderan atau kegiatan PKS yang disenangi oleh

masyarakat , sehingga PKS menjadi partai yang banyak dipilih di Bandung.

Mengingat bahwa PKS memiliki cara yang unik dalam memberikan pendidikan politik bagi kader perempuannya yang dipersiapkan untuk ikut kontestasi di instansi pemerintahan. Oleh karena itu walaupun PKS belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen akan tetapi PKS mampu mendistribusikan kader perempuannya lebih banyak dari partai lain.

Berdasarkan paparan tersebut peneliti terdorong untuk menganalisis Bagaimana pengaruh dari pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh partai PKS melalui latar belakang ini peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Pendidikan Politik pada Partai PKS ( Partai Keadilan Sejahtera ) terhadap Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Parlemen di Kota Bandung”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan masalah di atas, teridentifikasi masalah sebagai berikut

- 1.2.1 Keterlibatan perempuan dalam parlemen khususnya di partai PKS belum memenuhi target 30% keterlibatan perempuan dalam parlemen.
- 1.2.2 Menumbuhkan kesadaran politik dengan memberikan pendidikan politik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

- 1.3.1 Bagaimana kondisi pendidikan politik di partai PKS kota Bandung?
- 1.3.2 Bagaimana kondisi partisipasi perempuan di partai PKS kota Bandung?
- 1.3.3 Bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi perempuan di partai PKS kota Bandung?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.4.1 Untuk mengetahui kondisi pendidikan politik di partai PKS kota Bandung.
- 1.4.2 Untuk mengetahui kondisi partisipasi perempuan di partai PKS kota Bandung.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi perempuan di partai PKS Kota Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyumbangan pengetahuan dan pemikiran baru, khususnya dalam bidang ilmu politik.
2. Hasil riset ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi kalangan akademisi dan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat intelektualitas dan memperluas wawasan.

#### **2. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berupa tambahan data dan analisis yang relevan bagi lembaga terkait.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharap akan memberi informasi dan pemahaman untuk masyarakat khususnya bagi perempuan agar ikut andil dan melek serta berpartisipasi dalam politik, karena kehadiran perempuan dalam parlemen dibutuhkan dalam membuat kebijakan terutama terkait tentang perempuan itu sendiri.

## **1.6 Batasan Penelitian**

Partai PKS telah menunjukkan keberadaan dan kestabilan yang kuat sejak awal berdirinya hingga sekarang di Indonesia. Ini terlihat dari berbagai faktor yang mendukung basis massa PKS, yang merupakan bagian dari strategi kultural yang kokoh. Salah satu faktor utama dalam strategi ini adalah proses kaderisasi internal yang membentuk kesadaran politik di kalangan kader PKS. Khususnya untuk kader perempuan, penelitian ini difokuskan pada isu pendidikan politik di BPKK Kota Bandung, yang merupakan bagian dari struktur perempuan dalam partai. Penelitian juga membahas pola rekrutmen calon anggota legislatif dan eksekutif, serta distribusi kader ke dalam organisasi masyarakat sebagai bentuk advokasi hasil pendidikan politik yang telah diberikan kepada kader perempuan PKS Kota Bandung melalui BPKK di partai PKS Kota Bandung.

## **1.7 Kerangka Pemikiran**

Kurangnya partisipasi perempuan untuk ikut berkompetisi dalam politik di ranah parlemen menjadi tugas terbesar bagi setiap partai-partai. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan politik dikalangan perempuan. Pendidikan politik penting bagi seorang perempuan bertujuan agar dia tahu bagaimana seharusnya dia berekspresi diruangan publik. PKS sebagai salah satu partai yang mewadahi akan hal itu melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh partai memberikan pendidikan kepada kaum perempuan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan sehingga pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik ataupun politik.

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami kondisi dan situasi sosial serta mampu memberikan kritik kepada pemerintah dan sanggup memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan kedamaian hidup bersama. Sehingga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik. Pendidikan politik dan partisipasi politik itu merupakan

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan partisipasi politik maka perlu pendidikan politik, karena dengan hal itu seseorang atau sekelompok orang tau apa yang seharusnya ia lakukan, bagaimana cara melakukan, dan untuk apa ia melakukan.

Dalam bukunya Kartini Kartono menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan pendidikan bagi orang dewasa, seiring dengan berubahnya zaman pendidikan politik perlu diberikan juga kepada kaum muda sebagai agen perubahan bangsa kedepannya, untuk dapat dipersiapkan melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya. Selain itu Kartini Kartono menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan agar masyarakat sebagai individu dapat memahami kondisi politik yang sedang terjadi atau tantangan yang akan dihadapi serta memiliki keberanian untuk memberikan masukan, kritikan terhadap pemerintah dalam kondisi sosial politik yang sedang dihadapi, yang menyangkut dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan tujuan pendidikan politik tersebut diharapkan mampu menimbulkan kesadaran dalam diri perempuan untuk berpartisipasi dalam parlemen sehingga kuota 30% dapat terpenuhi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat meningkat.

Tabel 1.3  
Kerangka pemikiran

